

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena arab spring yang terjadi tahun 2011 menjadi momentum bagi oposisi Yaman, hal itu dapat dilihat dengan adanya pemberotakan suku Al-Houthi di Yaman utara, yang meminta turunnya Ali Abdullah Saleh dari kursi kepresidenan Yaman. Suku Al-Houthi meminta diktator Yaman itu turun dari rezim kekuasaannya yang telah memimpin Yaman selama 32 tahun. Ali Abdullah Saleh memang dikenal sebagai figur pemimpin arab yang pandai berkelit dan memainkan opini rakyat, kepiawaian itulah yang membuatnya mampu bertahan selama 32 tahun dan berkuasa di Yaman dan selamat dari berbagai percobaan teror. Ali Abdullah Saleh akhirnya tumbang, karena demonstrasi 1 juta massa mendesak Ali Abdullah Saleh lengser dari kursi Presiden yang ia duduki 32 tahun.

Demonstrasi dipicu ketika Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap langgeng berkuasa. Terlebih Rezim Ali Abdullah Saleh tidak mampu menyejahterakan rakyat Yaman. Kemiskinan yg meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40 persen. Di bawah Ali Abdullah Saleh, rakyat juga diresahkan oleh masalah keamanan, seperti pemberontakan Al Qaeda di Selatan dan Al Houthi di Utara.

Kekosongan kursi kepresidenan saat itu menuai banyak permasalahan yang timbul, dikarenakan kekosongan kursi kepresidenan itu, banyak membuka peluang bagi kelompok atau organisasi yang ingin menduduki kursi kebesaran sebuah negara. Saat itu pun para gerakan revolusioner Yaman merayakan kepergian Ali Abdullah Saleh yang mereka sebut sebagai jatuhnya rezim otoriter Yaman. Pada kenyataannya kejatuhan atau turunnya Ali Abdullah Saleh dari kursi

kepresidenan bukan merupakan awal yang baik bagi perkembangan Yaman. Perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya otoriter menjadi demokrasi. Dengan dimulainya babak baru dari era demokrasi membuat rakyat memiliki aspirasinya masing-masing, tidak mempunyai ide dan metode yang sama dan terintegrasi. Tanpa kesiapan konsep yang baru dan matang dari penguasa terpilih negara akan mengalami kegagalan dalam mengatur gelombang masyarakat yang memiliki ide dan metode yang berbeda-beda. Pemberontakan yang terjadi pada masyarakat Yaman menjadi sangat emosional, yang dikhawatirkan akan berubah menjadi revolusi fisik dan kemudian berubah menjadi kekisruhan di dalam tubuh Yaman itu sendiri.

Jalannya sebuah roda pemerintahan sebuah negara tentunya membutuhkan figur seorang pemimpin. Kekosongan kursi kepemimpinan Yaman saat itu tentu saja membuat pemerintahan Yaman tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Yaman perlu dengan segera mencari sosok pemimpin pemerintahannya. Abd-Rabbu Mansour Hadi selaku wakil presiden selama masa kepemimpinan Ali Abdullah Saleh, menjadi calon tunggal untuk menggantikan atau mengisi kekosongan kursi tertinggi di pemerintahan Yaman itu. Pemilihan umum untuk mencari presiden itupun segera dilakukan. Namun, jalannya pemilihan umum itu tidak berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Pemberontakan terjadi di Yaman Selatan, yang dinilai sebagai bentuk penolakan pemilihan presiden.

Para pemberontak mencoba untuk memboikot pemilihan umum tersebut, agar pemilihan umum berjalan dengan memiliki dua atau lebih calon presiden Yaman. Pemerintahan Yaman yang berpusat di Yaman Utara membuat pemilihan itu harus tetap berjalan, yang notabene masyarakat Yaman Utara menyetujui dengan adanya pemilu presiden walau hanya memiliki satu kandidat calon presiden Yaman. Pemilu tersebut tetap berjalan dengan atau tidak keikutsertaan beberapa masyarakat di Yaman Selatan, yang menghasilkan terpilihnya Abd-Rabbu Mansour Hadi selaku presiden Yaman yang baru. Untuk itu konflik dan perpecahan di Yaman kini menjadi tanggung jawab Abd-Rabbu Mansour Hadi untuk segera di selesaikan.

Sebagian besar daerah di Yaman kini hampir tidak luput dari konflik. Meluasnya konflik di Yaman menjadi sebuah tantangan yang harus segera diselesaikan oleh Abd-Rabbu Mansour Hadi selaku kepala Negara Yaman. Berbagai cara dan upaya harus segera dilakukan agar dapat mengembalikan stabilitas Yaman seperti semula. Konflik Yaman meliputi hampir seluruh sektor pemerintahan di Yaman, mulai dari masalah keamanan, politik, kesehatan, lingkungan, bahkan sampai pergerakan separatis di Yaman Selatan. Melihat masalah yang terjadi, pemerintah Yaman merasa kewalahan dan perlu untuk meminta bantuan. Saat itu Negara relasi terdekat Yaman adalah Amerika Serikat, karena beberapa tahun sebelum konflik Yaman terjadi, kerjasama antar kedua Negara tersebut telah berjalan dibidang perang terhadap terorisme, untuk itu Yaman meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Selain itu kepentingan Amerika Serikat di Yaman adalah menjaga stabilitas keamanan di Yaman, karena untuk menjaga selat bab el mandeb yang merupakan jalur perdagangan antara eropa dengan Amerika Serikat melalui selat tersebut.

Adanya kepentingan Amerika Serikat ditanah timur tengah adalah salah satu alasan Amerika Serikat dalam membantu Yaman keluar dari krisis yang sedang terjadi. Amerika Serikat sendiri telah menyatakan akan menumpas seluruh kegiatan yang berbau terorisme. Adanya *Al Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP) di Yaman juga merupakan salah satu alasan yang sangat masuk akal masuknya Amerika Serikat di Yaman. Beberapa artikel juga menyebutkan bahwa masuknya Amerika Serikat ke Yaman bertujuan untuk membangun pangkalan militer yang terdapat pulau bagian selatan Yaman pada tahun 2012.

Pada tahun 2011 (A Comprehensive Approach to Yemen, hlm.1) Amerika Serikat memberi bantuan dana kepada Yaman untuk membantu dalam meningkatkan kapabilitas pemerintahan dalam Negeri Yaman, dan untuk memberi bantuan kemanusiaan di daerah utara Yaman yang memiliki konflik serta untuk pengungsi di selatan Yaman. Terdapat 3 (tiga) kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peranannya di Timur Tengah. *Pertama*, menciptakan stabilitas sekaligus menguasai dan membawa Timur Tengah dalam pengaruh Amerika Serikat. Yang *kedua*, ikut menstabilkan wilayah tersebut secara bersama-sama

dengan bangsa-bangsa Timur Tengah sambil mengimbangi pengaruh-pengaruh komunis yang ingin mempengaruhi kawasan tersebut. Dan yang *ketiga* seperti yang diinginkan oleh bangsa-bangsa Timur Tengah untuk menjadi negara yang aman, damai, bebas, dan netral.

Sedangkan pada tahun 2012 adalah momentum bagi Amerika Serikat untuk segera memberikan bantuan untuk Yaman. Serta untuk segera membendung atau memberhentikan efek domino dari Arab Spring, dan memberikan pemahaman yang luas bagi warga Yaman. Presiden Barack Obama dan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi menegaskan keinginan mereka untuk memperluas dan memperkuat hubungan Amerika Serikat dengan Yaman. Presiden Obama menegaskan dukungan Amerika Serikat untuk stabilitas, keamanan, kemakmuran, dan kesatuan Yaman. Dia juga memuji pemerintah Yaman untuk komitmen mereka dalam masa transisi demokrasi dan dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan di Yaman melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi terima kasih kepada Presiden Obama atas dukungan teguh Amerika Serikat kepada Yaman selama saat kritis ini dalam sejarah. Dia juga memuji upaya Presiden untuk memajukan perdamaian, keamanan, dan kesempatan di Timur Tengah. Kedua Presiden berjanji untuk terus bekerja sama untuk membantu orang-orang Yaman untuk menyadari aspirasi mereka guna memperkuat pemerintahan, keamanan, dan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan meningkatkan kesempatan ekonomi.

I.2 Rumusan Masalah

Mengamati kasus polemik yang bergulir di Yaman serta keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu menstabilkan keadaan di Yaman. Peran Amerika yang begitu signifikan di Yaman memunculkan perumusan masalah untuk penelitian ini: ***“Bagaimana Peran Amerika Serikat dalam Menciptakan stabilitas Yaman Pasca Runtuhnya Rezim Ali Abdullah Saleh Periode 2012-2014?”*** Hal ini dikarenakan periode 2012 menjadi langkah awal peneliti untuk

menelusuri lebih lanjut bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Yaman.

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

- a. Mengetahui kondisi Yaman pasca runtuhnya rezim Ali Abdullah Saleh.
- b. Memahami respon masyarakat internasional atas apa yang terjadi di Yaman.
- c. Menganalisa upaya Amerika Serikat memberi bantuan kepada Yaman.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

- a. **Manfaat Praktis:**
Secara praktis, penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami dan mengembangkan kemampuan penulis dalam pembuatan karya ilmiah, khususnya bantuan negara terhadap negaralain yang membutuhkan bantuan.
- b. **Manfaat Akademis:**
Secara akademisi, penelitian ini untuk memperkaya penelitian tentang bagaimana cara kerja sebuah negara memberikan bantuan kepada negara lain dan dapat dijadikan sebuah referensi bagi mahasiswa dalam melengkapi sebuah karya tulis.

I.5 Tinjauan Pustaka

Konflik yang terjadi di Yaman bukan saja terjadi akibat persaingan antar kedua suku yang ada di Yaman tetapi juga terjadi karena gagalnya sebuah sistem pemerintahan yang menimbulkan tekanan dari rakyat Yaman terhadap pemimpin Yaman saat itu.

Telah banyak hasil penelitian berbentuk buku, jurnal, maupun artikel yang membahas konflik yang terjadi di Yaman dan apa yang dilakukan Amerika Serikat dalam membantu membangun kembali Yaman. Dalam tulisan ini, peneliti menggunakan referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan konflik yang terjadi di Yaman dan keterlibatan Amerika Serikat, strategi pemerintah Amerika Serikat dalam membangun kembali kestabilan roda pemerintahan Yaman. Dibawah ini beberapa tinjauan pustaka yang penulis sajikan, yaitu:

Pertama, Seperti yang dijelaskan oleh Erikson Kristian Simanjuntak melalui jurnal ilmiahnya yang berjudul "*Kepentingan Amerika Serikat di Yaman Dalam Upaya Menggagalkan Revolusi Yaman Oleh Al-Houthi Yang Didukung Iran Tahun 2011*", dalam jurnalnya Erikson menjelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat terkait menjadikan Yaman sebagai negara atau wilayah implementasi kebijakan politik, militer, dan pertahanan dan untuk mengantisipasi dukungan Iran terhadap perkembangan aktor penyebab konflik di Yaman. Penulis dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana respon Amerika Serikat terhadap terorisme yang ada di Yaman yang mengacu pada kebijakan "*war on terror*" yang Amerika Serikat keluarkan pasca tragedi 9/11. Selain itu jurnal ini membahas bagaimana perkembangan dan perjalanan Al-Qaeda dapat masuk dengan mudahnya ke Yaman.

Pada kawasan Timur Tengah, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat tampaknya tidak berbeda dengan dekade sebelumnya, yaitu kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menghadapi ancaman musuh Amerika Serikat yang ada di kawasan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah merupakan usaha Amerika Serikat untuk mempertahankan kepentingan dunia bebas dan ancaman ideologi komunis pada

saat menghangatnya Perang Dingin. Di tinjau dari sudut kepentingan nasionalnya, Amerika Serikat tentu tidak dapat membiarkan kekuatan lain ingin menguasai kawasan Asia Tenggara karena tertanamnya modal Amerika Serikat yang tidak sedikit di negara Timur Tengah yang kaya akan bahan baku dan letaknya yang sangat strategis antara dua benua dan dua samudera. Oleh karena itu maka Timur Tengah merupakan wilayah yang terus diperhitungkan oleh Amerika Serikat, termasuk juga Yaman.

Terdapat 3 (tiga) kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peranannya di Timur Tengah. *Pertama*, menciptakan stabilitas sambil menguasai dan membawa Timur Tengah dalam pengaruh Amerika Serikat. Yang *kedua*, ikut menstabilkan wilayah tersebut secara bersama-sama dengan bangsa-bangsa Timur Tengah sambil mengimbangi pengaruh-pengaruh komunis yang ingin mempengaruhi kawasan tersebut. Dan yang *ketiga* seperti yang diinginkan oleh bangsa-bangsa Timur Tengah untuk menjadi negara yang aman, damai, bebas, dan netral.

Jurnal diatas memiliki perbedaan dengan apa yang akan penulis bahas dalam penelitian yang penulis kerjakan. Perbedaan yang paling terlihat adalah fokus yang dijalankan oleh Amerika Serikat, Dimana Amerika Serikat lebih menitikberatkan bantuannya dari sektor pertahanan dan keamanan yaitu, kerjasama antara Amerika Serikat dengan Yaman terkait pemberantasan terhadap terorisme yang ada di Yaman. Sedangkan penulis akan menjelaskan bagaimana peran Amerika Serikat dalam memberi bantuan terhadap Yaman pasca turunnya rezim Ali Abdullah Saleh. Serta penulis akan lebih menjelaskan pengembangan bantuan Amerika Serikat yang tidak hanya dari sektor keamanannya saja, penulis juga akan menjelaskan lima strategi utama Amerika Serikat dalam membantu Yaman. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang penulis kerjakan adalah kerjasama dan bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Yaman melalui pendekatan kerjasama dibidang militer.

Kedua, adalah artikel yang berjudul "*American relations with Yemen*". Hubungan politik dan diplomatik antara Yaman dan Amerika Serikat berawal pada tahun 1946. Dengan diperkuat pada tahun 1959 pembangunan pemukiman khusus

Amerika Serikat di kota Taiz. Amerika Serikat merupakan Negara barat pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Arab Yaman pada tahun 1962. John F. Kennedy mengumumkan dukungannya pada tanggal 19 Desember 1962. Krisis Arab-Israel pada tahun 1967 ini menghasilkan pendinginan hubungan diplomatic antara Amerika Serikat dengan Negara-negara Arab termasuk Yaman.

Yaman merupakan mitra penting dalam perang melawan AQAP (Al-Qaeda in the Arab Peninsula), sebuah kelompok teroris yang berbasis di Yaman yang terus mempengaruhi warga Yaman. Antara tahun 2009-2012, anggota AQAP berusaha untuk meledakan beberapa pesawat milik Amerika Serikat. Untuk membantu melawan ancaman AQAP dan ancaman lainnya, Amerika Serikat melalui departemen luar negeri, badan pertahanan, dan USAID (badan resmi milik Amerika Serikat dalam bidang bantuan luar negeri) telah kolektif mengalokasikan lebih dari \$1 miliar dalam bentuk bantuan moral maupun materil pada tahun 2007-2012. Pada bulan Desember 1967, Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Yaman Selatan dari Inggris dan mengumumkan niatnya untuk membangun kantor perwakilannya. Namun rencana Amerika Serikat untuk membangun kantor perwakilannya di Aden dibatalkan karena adanya spekulasi adanya campur tangan politik di Yaman Selatan. Hubungan antara kedua Negara kembali diadakan pada Juli 1972, setelah adanya kunjungan menteri luar negeri Amerika Serikat ke sana. Hubungan Amerika Serikat dengan Yaman terus mengalami progress. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, masyarakat Amerika Serikat mulai lebih memperhatikan Yaman. Semenjak 1979-1991 pejabat dari kedua Negara bertukar kunjungan. Salah satunya kunjungan yang paling signifikan adalah kunjungan wakil presiden George Bush pada April 1987. Pada bulan Januari 1990, Ali Abdullah Saleh melakukan hubungan resmi pertamanya ke Amerika Serikat hanya beberapa bulan sebelum proklamasi persatuan antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan.

Artikel diatas menjelaskan bagaimana Amerika Serikat masuk dan memberi bantuannya ke pada Yaman. Artikel ini memberi pandangan kepada penulis bagaimana Amerika Serikat mampu masuk dan bekerjasama dengan Yaman. Dalam artikel ini juga menjelaskan apa saja yang dilakukan Amerika Serikat

sampai pada runtuhnya rezim Ali Abdullah Saleh. Hal tersebut membuat penulis berusaha untuk mengetahui lebih jauh lagi setelah runtuhnya rezim Ali Abdullah Saleh.

Ketiga, artikel yang dikeluarkan oleh situs resmi milik Amerika Serikat pada tahun 2010 dengan judul "*U.S. Humanitarian Assistance and the Situation in Yemen*". Pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Yaman dari \$29.6 juta menjadi \$42.5 juta. Bantuan ini akan menyediakan makanan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan layanan kesehatan untuk lebih dari 280,000 individu yang terlantar akibat konflik di utara Yaman, serta pengungsi di Yaman selatan. Selain itu Amerika Serikat juga mendesak donor lainnya untuk mendukung lembaga internasional yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak ini serta membantu menjamin keamanan hak-hak sipil dan relawan dalam situasi aman maupun tak terkendali sebagai bagian dari bantuan persediaan untuk mereka yang membutuhkan.

Amerika Serikat juga menyerukan dialog nasional yang komprehensif dan inklusif antara semua kelompok oposisi dan partai yang berkuasa. Dialog ini perlu dilakukan dengan itikad baik oleh semua pihak untuk mengatasi keluhan-keluhan dan meningkatkan stabilitas di Yaman.

Suatu kesatuan yang stabil, demokratis dan sejahtera Yaman akan membutuhkan pelaksanaan reformasi politik dan ekonomi dalam meningkatkan kepercayaan penduduk Yaman terhadap pemerintah mereka. Program ini terus dilakukan melalui kerjasama dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa penduduk Yaman mendapat manfaat dari reformasi politik, ekonomi dan sosial serta mencapai hasil tujuan pembangunan jangka panjang.

Artikel ini hanya berfokus pada bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam proses pembangunan stabilitas di Yaman. bantuan kemanusiaan ini hanya salah satu dari beberapa strategi yang Amerika Serikat keluarkan. Untuk itu penelitian ini akan mencoba mengulas lebih mendetail mengenai strategi Amerika Serikat di Yaman.

I.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiono 2009, hlm. 92). Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono (2011, hlm. 60) mengemukakan bahwa Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Amerika Serikat Dalam Pembangunan Stabilitas Yaman Pasca Runtuhnya Rezim Ali Abdullah Saleh Periode 2012-2014”, penulis akan memaparkan beberapa konsep dan teori seperti, Teori Resolusi Konflik, Teori kerjasama internasional, Konsep Bilateral dan Konsep Peranan Negara. Dimana teori dan konsep tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan untuk penulis dalam menjelaskan dan mengkorelasikan dengan rumusan masalah yang ada. Berikut ini beberapa teori dan konsep tersebut:

I.6.1 Teori Resolusi Konflik

Definisi konflik adalah suatu ekspresi pertentangan dari sekurang-kurangnya dua orang yang saling bergantung yang tujuannya saling bertentangan, memiliki sedikitnya sumber penghasilan dan campur tangan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka (Willmot dan Hocker 2001). Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1981) mengatakan bahwa konflik merupakan suatu proses atau keadaan dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk saling menggagalkan tujuan masing-masing karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntunan dari masing-masing pihak. Sementara itu konflik yang tidak terselesaikan akan menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu diperlukan adanya penanganan atau resolusi konflik.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Berdasarkan buku panduan pengelolaan konflik

yang dikeluarkan oleh The British Council (2001), bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Negosiasi, suatu proses untuk memungkinkan pihak- pihak yang berkonflik untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan pilihan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka.
- b. Mediasi, suatu proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga sehingga pihak-pihak yang berkonflik menemukan penyelesaian yang mereka sepakati sendiri.
- c. Arbitrasi atau perwalian dalam sengketa, tindakan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutuskan dan menjalankan suatu penyelesaian.

Secara tradisional, tugas penyelesaian konflik adalah membantu pihak-pihak yang merasakan situasi yang mereka alami sebagai sebuah situasi *zero-sum* (keuntungan diri sendiri adalah kerugian pihak lain). Agar melihat konflik sebagai keadaan *non-zero-sum* (di mana kedua belah pihak dapat memperoleh hasil atau keduanya sama- sama tidak memperoleh hasil) dan kemudian membantu pihak- pihak yang berkonflik berpindah ke arah hasil yang positif (Miall dkk, 1999). Untuk menciptakan hasil *non-zero-sum*, Miall (1999) mewajibkan akan adanya pihak yang berfungsi menyelesaikan konflik.

Adapun beberapa konsep yang terkait dengan proses konflik adalah konsep *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* yang digunakan Johan Galtung (2011, hlm. 10) dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Conflict Resolution 0402* mendefinisikan *peacekeeping* sebagai proses penghentian atau pengurangan aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. Kemudian *peacemaking* mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategis dari pihak-pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. Selanjutnya *peacebuilding* diartikan sebagai proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian dalam artian positive

peace dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik internal, khususnya masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keterwakilan politik yang efektif.

- a. *Peacemaking*: adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode yang bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif jika dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, Negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola Negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dalam kasus dimana Negara tidak memiliki legitimasi, pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berupaya menyelesaikan konflik dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama, kendati secara hukum illegal. Model ini juga disebut sebagai *interactive conflict resolution*.

Peacemaking merupakan tindakan penegakan kembali perdamaian pasca konflik yang meliputi pembentukan perdamaian dengan cara penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang berunding. Mediasi adalah proses yang bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu orang-orang mendiskusikan dan menegosiasikan persoalan-persoalan yang amat pelik dan sulit agar tercapai kesepakatan sehingga konflik yang membawa berbagai bentuk kekerasan yang dapat dihindarkan.

Langkah-langkah penting dalam mediasi sebagai salah satu bentuk dari resolusi konflik ialah: pengumpulan informasi, perumusan masalah, secara jelas dan jernih, pengembangan berbagai opsi, negosiasi, dan formulasi kesepakatan. Arbitrasi merupakan proses yang mana pihak

ketiga yang netral mengeluarkan keputusan untuk menyelesaikan konflik setelah ia mengkaji berbagai bukti dan mendengarkan berbagai argument dari kedua belah pihak yang sedang bertikai.

- b. *Peacekeeping*: setelah melalui proses *peacemaking*, perdamaian dilakukan melalui proses *peacekeeping*. Galtung mendefinisikan *peacekeeping* sebagai proses penghentian atau pengurangan aksi kekerasan melalui intervensimiliter yang menjaloakan peran sebagai penjaga kedamaian yang netral. *Peacekeeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain.
- c. *Peacebuilding*: adalah tahapan ketiga dalam proses perdamaian. *Peacebuilding* adalah suatu cara atau inisiatif dari beragam aktor di pemerintahan atau masyarakat sipil seperti lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengatasi konflik dengan mencari akar dari penyebab terjadinya konflik kekerasan dan juga melindungi dari warga dari sebelum, selama dan setelah terjadi konflik kekerasan. Para aktor yang menggunakan konsep *peacebuilding* menggunakan cara-cara untuk mencapai tujuannya melalui komunikasi, negosiasi dan mediasi, dan bukan dengan cara-cara kekerasan. Para aktor *peacebuilding* mencoba untuk menemukan jalan yang memungkinkan para pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan permasalahan dan perbedaan mereka tanpa melalui pertumpahan darah, karena salah satu tujuan *peacebuilding* adalah untuk mengurangi frekuensi konflik sertamenghilangkan tingkat konflik kekerasan.

Strategi *peacebuilding* memiliki tahapan-tahapan waktu yang meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang serta mencakup berbagai dimensi seperti politik, ekonomi, social dan internasional. *Peacebuilding* umumnya dilakukan oleh actor domestic seperti masyarakat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat, namun tidak dipungkiri aktor eksternal seperti organisasi internasional, Negara donor, dan internasional *non-governmental organizations*

memiliki peranan penting dalam memfasilitasi dan mendukung upaya peacebuilding.

Perlunya menggunakan konsep *peacebuilding* adalah untuk menciptakan suatu perdamaian dikarenakan konflik yang dihentikan melalui kesepakatan damai masih cenderung memiliki kemungkinan terjadinya kembali konflik. Terjadinya pengulangan konflik dapat menyebabkan banyak dampak yang merugikan seperti kerugian material dan psikologis, selain itu biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk proses damai menjadi sia-sia karena konflik kembali terjadi, dan biasanya konflik yang berulang dapat semakin mempersulit proses perdamaian kembali karena cara-cara yang telah ditempuh sebelumnya terbukti tidak berguna karena konflik kembali terjadi, sehingga diperlukan pencarian cara lain untuk proses perdamaian yang sudah pasti akan lebih sulit dari proses perdamaian yang sebelumnya. Beberapa poin penting dari tujuan utama peacebuilding adalah:

- 1) Menciptakan keamanan dan ketertiban publik.
- 2) Membangun kerangka kelembagaan dan politik bagi terwujudnya perdamaian jangka panjang.
- 3) Menjamin keadilan dan penegakan hukum (*rule of law*)
- 4) Mendukung memulihkan psiko-sosial dan trauma akibat konflik.
- 5) Meletakkan dasar social-ekonomi bagi terwujudnya perdamaian jangka panjang.

I.6.2 Teori kerjasama internasional

Negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya (Zulkifli 2012, hlm. 17)

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (James dan Robert, 1986: 419). Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama untuk mencari solusinya. Perkembangan didalam Politik luar negeri dimana terdapat berbagai pola-pola yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997: 418).

Sementara itu menurut Kalavi Jaakko Holsti (1988, hlm. 652-653), kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Disisi lain menurut ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles. A. McClelland dalam bukunya mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas

dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya adalah terdapat dalam suatu kerjasama internasional, misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional. Kerjasama dalam pengumpulan dan penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antar gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir.

Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter toma dan Robert Gorman, diantaranya :

- a. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.
- b. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.
- c. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.
- d. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme (Toma dan Gorman 1991:385-386).

Selain itu kerjasama internasional dapat didefinisikan menjadi empat bagian, yaitu pertama, merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya; kedua, mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut; ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu; keempat, mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak (Gilpin, 1997:33).

Dalam kerjasama internasional, bentuk dari kerjasama ini dapat diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh individu, kelompok, dan negara, diantaranya:

- 1) Kerjasama Universal (Global), hakekat dari kerjasama ini untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari integrasi internasional, seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa;
- 2) Kerjasama Regional, bentuk kerjasama antara negara yang berdekatan secara geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan struktur produktivitas untuk saling membutuhkan, seperti *ASEAN Regional Forum (ARF)*;
- 3) Kerjasama Fungsional, bentuk kerjasama yang diasumsikan sebagai saling mendukung fungsi dan tujuan bersama, kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang mengisyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama, seperti *Non Poliferation Treaty (NPT)*;
- 4) Kerjasama Ideologis, bentuk kerjasama yang dilatar belakangi kesamaan ideologis, diantara para pelaku kerjasama tersebut, seperti pada perang dingin, Pakta Warsawa (Gilpin, 1995:589).

I.6.3 Konsep Bilateral

Sebagai pendalaman atau pemfokusan penulis terhadap masalah Yaman, penulis menggunakan konsep yang di ambil dalam teori kerjasama internasional. Didalam studi Hubungan Internasional, kerjasama yang terjadi di antara dua negara yang sifatnya saling menguntungkan secara umum dikenal dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah “negara” (*state actors*) (Agung dan Yanyan 2005, hlm. 28)

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep bilateral untuk menggambarkan kejelasan didalam hubungan dua negara di dalam satu kawasan hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut :

- a. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
 - b. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
 - c. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
 - d. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.
- (Perwita dan Yani 2005:42)

Dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral merupakan perjanjian yang meliputi didalamnya terlibat dua negara yang membicarakan kelanjutan masa depan dari hubungan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Hubungan bilateral terjadi diantara *state-to-state*, dimana yang didalamnya terdapat pula aktor-aktor negara sebagai pelanar pembuat keputusan. Dalam perjanjian bilateral ini, kesepakatan-kesepakatan yang timbul dapat meliputi bidang-bidang diantaranya bidang politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, pendidikan, keamanan dan pertahanan. Perjanjian yang dihasilkan dalam hubungan bilateral ini, memiliki peran penting dan beberapa keuntungan didalam berbagai negosiasi dan dapat memberikan sebuah pertukaran atas fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kedua negara yang bersepakat tercapainya tujuan kedua negara (Goldstein 2003 : 333).

Teori ini nantinya akan di gunakan untuk menjelaskan strategi Amerika Serikat dalam membantu Yaman pada masa pembangunan pasca rezim Ali Abdullah Saleh, seperti yang dijelaskan nantinya teori ini akan di gunakan pula untuk menganalisa peran Amerika Serikat di Yaman.

I.6.4 Konsep Peranan Negara

Konsep peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan yang kebetulan dipegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu. Harapan dan dugaan itulah yang membentuk peranan. Peranan memiliki dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Sedangkan dalam studi hubungan internasional dilakukan oleh aktor-aktor internasional, seperti individu, nation-

state, maupun organisasi internasional yang sifatnya lintas batas. Menurut Rosenau, terdapat lima aktor hubungan internasional, yaitu:

- a. Individu-individu tertentu
- b. Kelompok-kelompok dan organisasi swasta
- c. Seluruh negara bangsa beserta pemerintahannya
- d. Organisasi internasional.
- e. Seluruh wilayah geografis dan pengelompokkan-pengelompokkan politik utama dunia, seperti dunia ketiga (Rosenau, 1976: 5).

Peranan yang melekat dalam diri individu harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menempatkan individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjuk pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social dalam masyarakat (Soekanto, 1990:269).

Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" yaitu:

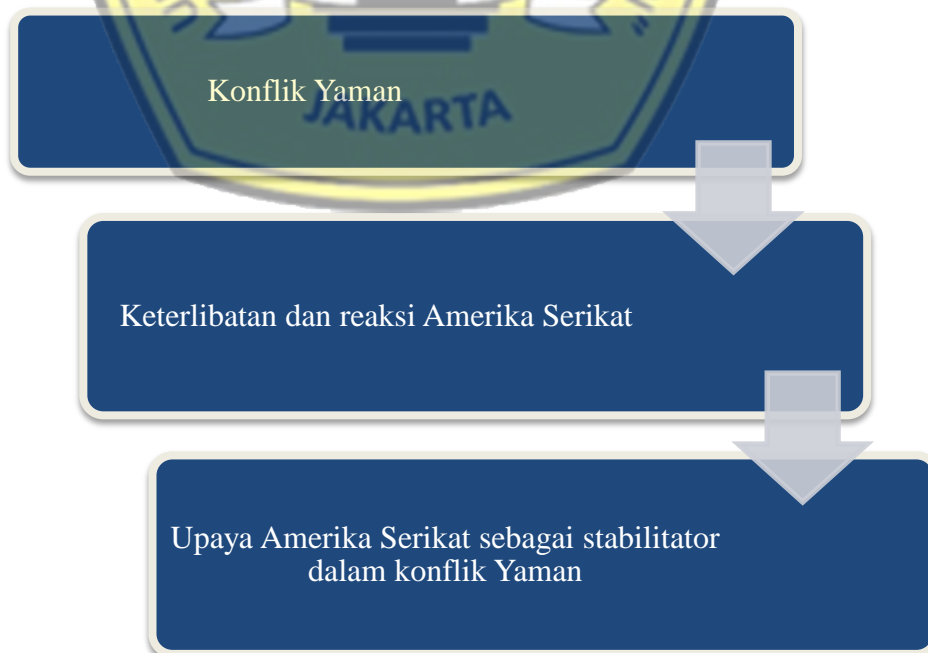
“Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi Negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan

pokok,kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi”

(1992:159)

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dengan pola yang menyusun struktur social.Peran sendiri merupakan seperangkat perilaku yang dapat terwujud sebagai perorangan sampai dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peranan. Baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur (Kantaprawira,1987:32).

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

Efek arab spring memaanng telah meresahkan dunia internasional dan khususnya kawasan timur tengah. Yaman yang menjadi focus pembahasan dalam karya ilmiah yang penulis teliti memiliki dampak yang sangat signifikan.

- a. Runtuhnya rezim yang berkuasa selama 32 tahun di Yaman, menimbulkan banyak konflik internal yang ada didalam negeri Yaman. Efek yang ditimbulkannya npun mampu mencuri perhatian dunia internassional
- b. Amerika Serikat selaku Negara maju yang memiliki kedekatan khusus dengan Yaman, merasa harus segera membantu Yaman keluar dari kemelut yang terjadi.
- c. Amerika Serikat memalui berbagai badan khususnya segera bergerak memberikan bantuannya kepada Yaman.

I.9 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2004, hlm.1) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut I Made Wirartha (2006, hlm. 68) metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun penelitian berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

I.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif. Pada jenis penulisan deskriptif, penulis berupaya memberikan penjelasan mengenai bagaimana strategi Amerika Serikat dalam membantu membangun kembali stabilitas dalam negeri Yaman.

I.9.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang secara langsung penulis dapatkan dari buku atau situs resmi kenegaraan tentang permasalahan ini.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentary research*.

I.9.3 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menyajikan data dan dokumen resmi. Penyajian data sendiri adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian kualitatif dalam penulisan ini berupa teks naratif, grafik, dan table yang digunakan untuk memperjelas bagaimana proses kasus tersebut berjalan.

I.10 Sistematika Pembabakan

Untuk mempermudah penulis dalam memahami isi dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini dalam 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, alur pemikiran, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II KONDISI STABILITAS DALAM NEGERI YAMAN

Bab ini menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi didalam negeri Yaman, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu factor dalam negeri dan factor dari luar negeri.

BAB III PERAN AMERIKA SERIKAT SEBAGAI STABILITATOR TERHADAP KRISIS YAMAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci bagaimana keterlibatan Amerika Serikat dalam masa pembangunan di Yaman.dan menjelaskan strategi yang dilakukan Amerika Serikat untuk membantu Yaman dalam membangun stabilitas dalam negeri.

BAB IV PENUTUP

Bab IV merupakan bagianpenutup yang menyajikan kesimpulan akhir dan saran dari penelitian ini.

